

Peran Elit Tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018: Analisis Peran Aktif, Partisipatif, dan Pasif

Wahyu Hidayat¹, Sri Yunanto², Asep Setiawan³

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: ¹wahyu.wh51@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Peranan Elit Tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Kerinci. Latar belakang penelitian adalah begitu pentingnya peranan elit adat dalam memenangkan kontestasi pilkada kabupaten kerinci pada tahun 2018. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan Untuk mengetahui Bagaimana Peran elit tradisional adat tigo luhah tanah sekudung dalam pilkada tahun 2018 di kabupaten kerinci.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan triangulasi data yang mencakup wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi langsung terhadap aktivitas politik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Elit adat tigo luhah tanah Sekudung sangat mempengaruhi keterpilihan dan kemenangan calon bupati dan wakil bupati kerinci pada tahun 2018 dengan 3 bentuk peran yang dimainkan yakni Peran aktif, partisipatif dan pasif (*causal role theory*) Lewis A. Coser. hasil penelitian sudah mampu menjawab peran penting elit dalam pilkada. Kesimpulannya, Peran dan keterlibatan elit adat dan agama sangat penting dan mampu mengintegrasikan warga tigo luhah tanah sekudung untuk memilih dan mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati sehingga terpilih dan menang pada pilkad 2018. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan strategi politik dan rekomendasi bagi Politisi dalam menghadapi pemilu, khususnya di wilayah dengan daerah yang masih menjunjung nilai adat istiadat seperti Kabupaten Kerinci.

Kata Kunci: Peranan, Elite Tradisional, Kabupaten Kerinci, Pilkada 2018.

Abstract

This research analyzes the role of the traditional elites of Tigo Luhah Tanah Sekudung in the 2018 Regional Head Election in Kerinci Regency. The background of the study is the significant role of traditional elites in winning the 2018 Kerinci Regency regional election contest. The research aims to identify and understand how the traditional elites of Tigo Luhah Tanah Sekudung played a role in the 2018 regional election in Kerinci Regency. This study uses a descriptive qualitative method with a data triangulation approach, including in-depth interviews, document studies, and direct observation of political activities in the field. The results of the study show that the role of the traditional elites of Tigo Luhah Tanah Sekudung significantly influenced the election and victory of the regent and vice-regent candidates in Kerinci in 2018. The elites played three forms of roles: active, participatory, and passive (based on Lewis A. Coser's causal role theory). The findings successfully answered the important role of elites in the regional election. In conclusion, the role and involvement of traditional and religious elites were crucial and able to integrate the residents of Tigo Luhah Tanah Sekudung to vote for and support the regent and vice-regent candidates, leading to their election and victory in the 2018 regional election. This research provides practical contributions to the development of political strategies and recommendations for politicians facing elections, especially in regions that still uphold traditional values, such as Kerinci Regency.

Keywords : Role, Traditional Elites, Kerinci Regency, 2018 Regional Head Election.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme penting dalam demokrasi Indonesia. Pilkada tidak hanya memilih pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi lokal. Dalam proses ini, elit politik dan sosial berperan besar dalam memengaruhi hasil.

Sejak Orde Baru hingga Reformasi, elit selalu menjadi aktor utama. Setelah otonomi daerah dan Pilkada langsung tahun 2005, pengaruh elit lokal semakin kuat. Mereka hadir sebagai kandidat maupun pendukung, menggunakan jaringan patronase, sumber daya ekonomi, dan pengaruh sosial untuk memobilisasi dukungan. Elit pengusaha juga sering menjadi penyandang dana kampanye dengan kepentingan ekonomi di baliknya. Kondisi ini memunculkan praktik seperti politik uang, oligarki, dan konflik kepentingan.

Meski begitu, elit juga bisa menjaga stabilitas politik dengan mengkoordinasikan berbagai kepentingan. Namun dominasi mereka sering dikritik karena mengurangi partisipasi masyarakat dan memarginalkan kelompok tanpa akses politik.

Dengan demikian, peran elit dalam Pilkada bersifat ambivalen: di satu sisi mendorong proses demokrasi lokal, di sisi lain berpotensi melemahkan prinsip kesetaraan dan partisipasi. Memahami dinamika ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih inklusif dan transparan.

Pemilihan Kepala Daerah selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Memahami tentang pengaruh elit lokal pada masyarakat dalam proses Pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Kaum elit merupakan istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Awal kemunculannya ialah karena kritik keras terhadap politik sosialisme (sosialisme marxis). Teori ini juga di arahkan untuk aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada apa yang disebut sebagai —elit penguasal yang dipertentangkan menentang gagasan demokratis dan sebagai bentuk sinisme terhadap aristokrat.

Pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus saling bekerja sama. Akibatnya, tidak pernah ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting dalam sistem politik Indonesia. Pilkada tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi cerminan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran elit politik dan sosial menjadi faktor krusial yang memengaruhi proses dan hasil Pilkada. Elit, baik yang berasal dari kalangan politisi, pengusaha, tokoh masyarakat, maupun birokrat, sering kali memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan outcome Pilkada.

Eksistensi elit lokal dalam politik lokal di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari peran elit lokal tersebut. Kemunculan elit-elit lokal baru melalui proses Pilkada secara signifikan telah memberikan warna baru dalam dinamika politik lokal.

Secara historis, elit telah lama menjadi aktor utama dalam politik Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Sejak era Orde Baru, kekuasaan politik di tingkat lokal sering kali didominasi oleh jaringan elit yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial. Setelah reformasi 1998, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi elit lokal untuk memperkuat pengaruhnya. Pilkada langsung yang dimulai pada tahun 2005 semakin memperjelas peran elit dalam mengendalikan proses politik di daerah.

Elit politik lokal sering kali menjadi kandidat dalam Pilkada atau menjadi pendukung utama bagi calon tertentu. Mereka memanfaatkan jaringan patronase, sumber daya ekonomi, dan pengaruh sosial untuk memobilisasi dukungan. Selain itu, elit pengusaha juga sering terlibat dalam Pilkada, baik sebagai penyandang dana kampanye maupun sebagai aktor yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap kebijakan daerah. Keterlibatan elit ini tidak jarang menimbulkan dinamika yang kompleks, termasuk praktik politik uang, oligarki, dan konflik kepentingan.

Di sisi lain, peran elit juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di daerah. Elit yang memiliki pengaruh kuat sering kali dianggap mampu mengkoordinasikan kepentingan berbagai kelompok dan mencegah konflik yang dapat mengganggu pembangunan daerah. Namun, dominasi elit dalam Pilkada juga menimbulkan kritik, terutama terkait dengan kurangnya partisipasi

masyarakat biasa dan potensi marginalisasi kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya politik.

Dengan demikian, peran elit dalam Pilkada merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, elit dapat menjadi penggerak utama dalam proses demokrasi lokal, tetapi di sisi lain, dominasi mereka juga dapat menimbulkan tantangan bagi prinsip-prinsip kesetaraan dan partisipasi dalam demokrasi. Oleh karena itu, memahami peran elit dalam Pilkada menjadi penting untuk menganalisis dinamika politik daerah dan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan.

Pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang. Para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus saling bekerja sama. Akibatnya, tidak pernah ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dengan demikian, persaingan antar elit politik lokal dapat dimaknai sebagai situasi yang menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci di pimpin oleh Bupati Adi Rozal yang dipilih langsung oleh rakyat di Kabupaten Kerinci. Kepemimpinan Adi Rozal berlangsung dalam 2 periode (2014-2019 dan 2019-2024) yang berakhir pada tahun 2024. Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2014 merupakan Pilkada yang pertama diadakan setelah Kerinci memekarkan diri dari Kota Sungai Penuh sehingga jumlah mata pilih tidak sebanyak sebelumnya.

Ternyata dukungan dari partai yang mendukung tidak menjamin bagi kemenangan seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat pemilihan berlangsung. Dimana pasangan Adi Rozal - Ami Taher di dukung oleh partai PAN, PPP, Hanura, PKS, dan Perindo, sedangkan pasangan Monadi- Edison didukung oleh Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Nasdem dan PBB sedangkan Pasangan Zainal Abidin – Aرسال Apri didukung oleh Partai Gerindra dimana pada periode sebelumnya partai Gerindra adalah pendukung Pasangan Calon Adi Rozal-Zainal Abidin. Jika melihat berdasarkan dukungan partai maka Pasangan Monadi- Edison berada pada urutan pertama dan Adi Rozal-Ami Taher pada urutan kedua yang disusul oleh pasangan Zainal Abidin-Aرسال Apri pada urutan ketiga. Jika melihat berdasarkan dukungan partai maka pasangan Monadi-Edison adalah pemenang dalam Pilkada, namun tidak begitu halnya karena yang menjadi pemenang dalam Pilkada Kerinci 2018 adalah pasangan Adi Rozal-Ami Taher. Dari sini tentu akan menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi factor pendukung dalam Pilkada Kerinci selain dukungan dari Partai Politik.

Pemilihan Kepala Daerah selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Memahami tentang pengaruh elit lokal pada masyarakat dalam proses Pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Kaum elit merupakan istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Awal kemunculannya ialah karena kritik keras terhadap politik sosialisme (sosialisme marxis). Teori ini juga di arahkan untuk aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada apa yang disebut sebagai —elit penguasa yang dipertentangkan menentang gagasan demokratis dan sebagai bentuk sinisme terhadap aristokrat.

Pilkada di Indonesia merupakan wujud desentralisasi yang diatur dalam UU No. 32/2004, memberi masyarakat kesempatan memilih pemimpin daerah secara langsung. Pada masa Orde Baru, tokoh masyarakat hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan, tetapi setelah desentralisasi mereka mulai berperan pragmatis dalam politik lokal. Namun, perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering memunculkan konflik, etnosentrisme, dan ego kedaerahan. Elit politik lokal terdiri dari pejabat eksekutif dan legislatif seperti gubernur, bupati, walikota, DPRD, serta pimpinan partai. Sementara elit non politik lokal mencakup tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda, profesi, hingga elit adat.

Elit adat memiliki posisi penting karena dihormati sebagai penjaga tradisi, penyelesaian konflik, dan pemimpin spiritual. Dalam Pilkada, mereka sering menjadi aktor strategis yang mampu memobilisasi dukungan, baik sebagai kandidat, pendukung, maupun mediator. Dukungan elit adat kerap menjadi kunci kemenangan kandidat, sekaligus sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Meski demikian, peran mereka juga menghadapi tantangan: risiko politik transaksional, pengaruh modernisasi, serta melemahnya otoritas tradisional di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, keterlibatan elit adat dalam Pilkada perlu diarahkan agar tidak sekadar menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dalam perspektif masyarakat Sakti Alam Kerinci, adat dipahami sebagai sesuatu yang *patut*, yakni sesuai akal sehat dan rasa masyarakat, bukan sekadar kebiasaan semata.

Dalam rangka memahami konteks penelitian ini, tinjauan pustaka ini akan membahas berbagai perspektif teoretis dan temuan-temuan empiris yang telah dikemukakan oleh para ahli terkait Peran Elit Adat dalam Pilkada. Penelitian pertama oleh Eka Suhartono, Hasruddin Nur mengenai *Peran Elite Adat Pada Pilkada Kabupaten Pinrang 2018*, menjelaskan bahwa peran elit ada bukan hanya sebatas pada pra pilkada, akan tetapi juga pada proses dan pasca pilkada tersebut dilaksanakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran elite adat dalam Pilkada Kabupaten Pinrang 2018 bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Elite adat tidak hanya berperan sebagai aktor politik pada tahap pra-Pilkada, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan politik selama proses Pilkada, serta sebagai pengawal kepentingan masyarakat adat pasca-Pilkada. Keterlibatan mereka mencerminkan interaksi yang erat antara tradisi adat dan modernitas politik, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya peran elite adat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dengan dinamika demokrasi nasional.

Penelitian kedua, Ahmad Bilal Tuhulele, Sri Yunanto (2022), *Peran Elit Adat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru tahun 2017*, Menjelaskan bahwa dalam proses Pilkada, pengaruh dan kekuasaan elit adat menjadi kunci dalam proses pilkada dalam memenangkan kandidat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh dan kekuasaan elit adat menjadi kunci dalam proses Pilkada Kabupaten Buru 2017. Elit adat tidak hanya berperan sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan stabilitas sosial. Keterlibatan mereka dalam Pilkada mencerminkan interaksi yang erat antara nilai-nilai adat dengan proses demokrasi modern. Namun, penelitian ini juga mengingatkan akan potensi risiko, seperti politisasi identitas adat atau praktik politik transaksional, yang perlu diwaspadai agar partisipasi elit adat dalam Pilkada tetap membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Nahrudin dkk dengan judul *Analisis Relasi Kekuasaan Elit Dalam Konteks Pemiihan Umum Di Indonesia* menjelaskan bahwa dinamika kekuasaan elit dalam pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap arah kebijakan negara dan proses demokrasi secara keseluruhan. Elit politik yang mendominasi pemilu memiliki keunggulan dalam memengaruhi agenda politik dan mengontrol proses politik, dengan memanfaatkan sumber daya politik, ekonomi, dan sosial yang mereka miliki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika kekuasaan elit dalam pemilu memiliki dampak yang signifikan terhadap arah kebijakan negara dan proses demokrasi secara keseluruhan. Elit politik yang mendominasi pemilu memiliki keunggulan dalam memengaruhi agenda politik dan mengontrol proses politik, dengan memanfaatkan sumber daya politik, ekonomi, dan sosial yang mereka miliki. Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan upaya untuk mengurangi dominasi elit dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka Suhratono dan Naruddin Nur dengan judul *Peran Elite Adat Pada Pilkada Kabupaten Pinrang 2018* menyimpulkan bahwa Peran elite adat pada Pilkada Kabupaten Pinrang pada hakikatnya membentuk struktur dengan fungsi masing-masing didalamnya dimana kondisi yang saat ini terjadi di Kabupaten Pinrang, mereka golongan elite adat dan mempunyai pengaruh signifikan di wilayah dimana mereka berkuasa sebelumnya berkerja atau berprofesi sebagai seorang ASN yang dengan demikian arah gerak politiknya sangat dibatasi oleh profesi serta kebijakan dan kuasa yang sedang memerintah. Kondisi di Kabupaten Pinrang sendiri terlihat timpang dalam aspek pengaruh pemerintah yang berkuasa terhadap roda politik khususnya pemilihan kepala daerah itu sendiri dikarenakan, penguasa yang saat ini sedang mengemban jabatan merupakan kerabat dekat atau keluarga dari salah satu pasangan calon kepala daerah.

Penelitian berikutnya Isan Bastiang dengan judul artikel *Peran Tokoh Adat di Kota Ternate Dlam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018* menyimpulkan bahwa peran tokoh adat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018, khususnya di Kota Ternate, sangat signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain tokoh adat tokoh yang juga berpengaruh pada Pilkada tersebut adalah tokoh agama. Adapun bentuk peran dari tokoh adat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan membantu pihak penyelenggara dalam melakukan sosialisasi terkait tahapan dan pentingnya partisipasi masyarakat. namun dalam meningkatkan partisipasi Politik Maluku Utara di Kota Ternate masih perlu pendidikan politik bagi masyarakat terkait dengan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu. Selain itu, memaksimalkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat masih sangat diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Destrina Lumendek dalam Jurnal Politico pada tahun 2018 yaitu. Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kabupaten Pulau Morotai Jaya Provinsi Maluku Utara. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan

masyarakat tentang perlunya suatu system pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistik. Demokrasi adalah proses menuju peradaban yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peranan Elit Tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Kerinci. Adapun tujuan penelitian ini Adalah Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Elit Tradisional Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Kerinci.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, desain penelitian, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data.

Desain Penelitian

Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Lebih lanjut Nazir menyatakan, jenis desain penelitian ada enam yaitu.

a. Desain penelitian yang ada control

Desain ini adalah desain percobaan atau desain bukan percobaan dan mempunyai control.

b. Desain penelitian Deskriptif-analitis.

Desain penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan desain penelitian analitis adalah studi untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan.

c. Desain penelitian lapangan atau bukan.

Penelitian ini menggunakan lapangan atau tidak.

d. Desain penelitian dalam hubungan dengan waktu.

Penelitian dengan menggunakan interval waktu tertentu.

e. Desain dengan tujuan evaluatif atau bukan.

Desain penelitian evaluatif atau bukan berhubungan dengan keputusan administratif terhadap aplikasi hasil penelitian.

f. Desain penelitian dengan data primer/sekunder.

Dalam penelitian dapat didesain menggunakan data primer atau data sekunder.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang “ Peran elit tradisional adat tigo luhah tanah sekudung dalam pilkada tahun 2018 di kabupaten kerinci”

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini penulis memilih jenis penelitian kualitatif. Maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek wawancara adalah Kandidat Bupati terpilih Adirozal dan Ami Taher, Ketua KPU (Kumaini), Ketua BAWASLU (Jatra), Ekit Tradisional Adat : Depati Intan Siulak Mukai (Hajisnur), Depati Mangku Bumi Siulak Gedang (H. Juhardi), dan Depati Simpan Bumi Siulak Panjang (Herman), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Pemilih.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah dokumen-dokumen tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumentasi penulis digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan yang diteliti.

Teknik Analisis Data Menggunakan Reduksi Data, Display Data (Penyajian Data), Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

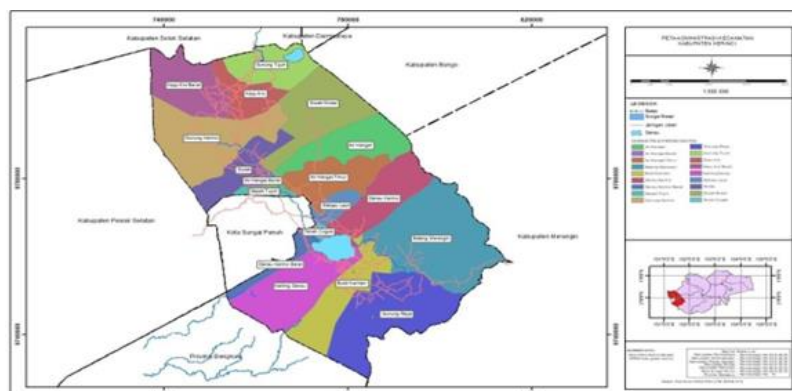
Kabupaten Kerinci Secara Administratif merupakan Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Berikut ini merupakan peta Administrasi Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi. Berikut ini pada gambar 2.1 merupakan Peta Administrasi Provinsi Jambi.



Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Jambi

Sumber <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/21/administrasi-provinsi-jambi/> (diunduh pada tanggal 13 Juli 2024, 17:46 WIB)

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah ujung Barat Propinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Bengkulu. Secara geografis Kabupaten Kerinci terletak antara 1°40'-2°26'



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Kerinci

Lintang Selatan dan 101°08'-101°50' Bujur Timur. Berikut ini gambar 2. merupakan Peta Administrasi Kabupaten Kerinci yang menunjukkan Lokasi Penelitian.

Tigo Luhah Tanah Sekudung

Tigo Luhah Tanah Sekudung adalah sebuah entitas masyarakat adat (disebut *Uhang Sulak*) di Kabupaten Kerinci yang memiliki sistem adat Perpatih dan budaya yang unik serta sangat terpelihara. Wilayah adat ini secara historis dilegitimasi oleh Sultan Jambi pada abad ke-18 dan dipimpin oleh tiga Depati (Raja Muda) yang masing-masing memiliki wilayah, otoritas, dan pemerintahan sendiri:

1. Depati Intan berkedudukan di Siulak Mukai (pemegang kekuasaan eksekutif).
2. Depati Mangku Bumi berkedudukan di Siulak Panjang.
3. Depati Simpan Bumi (Rajo Simpan Bumi) berkedudukan di Siulak Gedang (berfungsi sebagai penerima tamu agung dan pengawas).

Masyarakat sangat mematuhi dan menghormati para elit tradisional ini (Ninik Mamak), yang perkataannya dianggap sebagai keharusan bagi "anak kemenakan" (masyarakat). Struktur kepemimpinan ini menciptakan ikatan sosio-kultural yang sangat kuat.

Pilkada 2018 diwarnai oleh tiga pasangan calon, dimana dua di antaranya berasal dari wilayah Tigo Luhah:

1. Paslon 01: Monadi-Edison (dari Tigo Luhah)
2. Paslon 02: Adi Rozal-Ami Taher (dari Tigo Luhah, petahana yang juga seorang Ninik Mamak bergelar *Sko*)
3. Paslon 03: Zainal Abidin-Arsal Apri (dari Kerinci Hilir)

Secara logika dukungan partai, Paslon 01 seharusnya unggul. Namun, kenyataannya Paslon 02 (Adi Rozal-Ami Taher) yang memenangkan pilkada dengan perolehan suara 55.597, mengalahkan kedua rivalnya.

Kemenangan krusial terjadi di basis adat sendiri, wilayah Tigo Luhah (Kec. Siulak & Siulak Mukai, total penduduk: 31.966). Di sini, Paslon 02 meraih 11.945 suara, mengalahkan Paslon 01 yang juga berasal dari wilayah yang sama.

Faktor penentu kemenangan ini adalah dukungan implisit dari elit tradisional Tigo Luhah kepada Adi Rozal. Meskipun tidak aktif berkampanye (untuk menjaga marwah adat), keberpihakan halus dari para Depati dan Ninik Mamak—yang diwujudkan dalam peran partisipatif (sebagai penghubung dan edukator) dan terutama pasif (pengaruh melalui kharisma dan wibawa)—ternyata sangat efektif mengarahkan pilihan masyarakat. Pepatah adat "*bajalan dulu salangkah bakato dulu sapatah*" (berjalan dululah selangkah, berkatalah dululah sepatah) menggambarkan bagaimana masyarakat menjadikan mereka panutan.

Pilkada Kerinci 2018 membuktikan bahwa dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai tradisi, legitimasi dan dukungan dari elit adat non-pemerintah (non-governing elite) bisa menjadi faktor penentu yang lebih kuat daripada sekadar dukungan partai politik atau faktor kedaerahan. Kemenangan Adi Rozal menunjukkan kekuatan pengaruh kultural yang dimiliki oleh struktur adat Tigo Luhah Tanah Sekudung dalam memobilisasi dukungan politik.

Governing Elite di Pilkada Kabupaten Kerinci

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah instrumen utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan terjadinya proses sirkulasi atau pergantian elite politik. Sirkulasi elite mengacu pada peralihan kekuasaan dari satu kelompok elite kepada kelompok lainnya, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam politik lokal, salah satu bentuk nyata dari sirkulasi elite adalah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pilkada tidak hanya menjadi ajang kontestasi antara kandidat, tetapi juga ruang bagi elite politik untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Pergantian kekuasaan ini bisa terjadi melalui dua model. Pertama, sirkulasi elite antara elite yang sedang berkuasa dengan non-elite atau massa, dan kedua sirkulasi yang terjadi antar elite yang sudah mapan di lingkaran politik. Menurut Bottomor (1964) sirkulasi elite merujuk pada individu individu yang berputar antara elite dan massa atau non elite, atau bisa juga dikatakan sebagai pergantian dari elite yang memerintah digantikan dengan elite yang lain. Kedua model ini memberikan dinamika tersendiri dalam kompetisi politik di tingkat lokal.

Governing Elite adalah kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan, serta berperan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik.

Dalam Pilkada Kabupaten Kerinci Tahun 2018 beberapa tokoh elit dalam hal ini figur yang memiliki kekuasaan ikut serta dan hadir dalam kontestasi politik tersebut adalah para pimpinan pemerintahan atau elit pemegang kekuasaan yang terdiri dari gubernur, Bupati hingga Kepala Desa.

Para elit tersebut memiliki peran yang begitu penting dalam mensukseskan pilkada dalam suatu daerah. Apalagi pada tahun 2018 kabupaten Kerinci salah satu dari 5 daerah di Provinsi Jambi yang melaksanakan Pilkada Serentak. Tentunya peran elit pemegang kekuasaan sangat begitu penting.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kerinci tahun 2018, fenomena sirkulasi elite dapat dilihat dari kemenangan petahana Adi Rozal, yang telah menjabat sebagai Bupati selama lima tahun, menumbangkan kompetitornya yakni Zainal yang merupakan Wakilnya pada periode sebelumnya dan Monadi yang merupakan anak dari mantan Bupati periode 2008-2013. Kemenangan Adirozal merupakan contoh penting dari bagaimana elite yang sudah mapan dapat memenangkan kekuasaan. gubernur, Bupati/Walikota serta Kepala Desa disebut Governing Elit karena mempunyai karakteristik Memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan, berada di posisi strategis dalam struktur pemerintahan, serta Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik. Dan perannya begitu kuat didalam pemerintahan, Mengambil keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik, Mengelola sumber daya dan anggaran pemerintahan, serta Mengawasi dan mengontrol implementasi kebijakan publik. Hal inilah yang kemudian sangat berpengaruh terhadap proses pilkada.

Pilkada kerinci misalnya, peran Adi Rozal dalam hal ini calon bupati petahana sedikit banyak mempunyai infrastruktur politik yang begitu kuat dimana para stake holder sedikit banyak merupakan kaki tangannya. Hal itu tidak bisa dinafikan, sehingga suaranya sangat merata di seluruh wilayah kabupaten kerinci.

Non Governing Elite : (Peran Elit Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung di Pilkada)

Menurut Gaetano Mosca, non-governing elit adalah kelompok elit yang tidak memiliki kekuasaan politik langsung, tetapi memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam bidang lain, seperti ekonomi, sosial, atau budaya. Menurut Pareto salah satu kelompok elit yang tidak memerintah adalah elit tradisional. Kelompok ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu elit agama, pewaris budaya atau adat istiadat dan golongan bangsawan yang memiliki daulah atau wilayah. Keberadaan elit lokal dalam negara berkembang termasuk di Indonesia memiliki peranan penting dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Peran dan keikutsertaan elit lokal atau non governing elite pada pilkada kabupaten kerinci adalah dimana semua unsur sosial matoritas sudah dipegang oleh calon bupati Adi Rozal. Hal itu terlihat tokoh adat di wilayah Tigo Luhah Tanah sekudung secara terang-terangan menjatuhkan sikap dukungan terhadap Adi Rozal.

Pada masyarakat *Tigo Luhah Tanah Sekudung* ialah Depati Ninik Mamak, Apabila dilihat dari segi proses dan hasil pemilu merupakan bagian penting, mayoritas ikut berpartisipasi yakni Wilayah Tigo Luhah Tanah Sekudung yaitu terlihat dari Kecamatan Siulak dan Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Siulak berjumlah penduduk sebanyak 20.625 dan di Kecamatan Siulak Mukai berjumlah penduduk sebanyak 11.341 jadi total jumlah penduduk yang ada di wilayah Tigo Luhah Tanah Sekudung yaitu 31.966 penduduk. Adapun Tugas Depati adalah kata pemutus, *-beliaulah yang memakan habis memenggal putus*”.

Sedangkan masyarakat *Tigo Luhah Tanah Sekudung*, sebagaimana yang diulas pada bagian umum. Hidup guyub dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan, Depati dan Ninik Mamak berperan memimpin dalam keluarganya. Yang mana dalam penelitian ini disebut sebagai elit tradisional.

Keller berpendapat bahwa konsep elite yaitu elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang mengenai diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya.

Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa individu yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang disebut elit.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu system pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistik. Demokrasi adalah proses menuju peradaban yang baik.

Peran Non-Governing Elite, khususnya Elit Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung, dalam Pilkada Kerinci sangat signifikan. Mereka berperan sebagai pemimpin adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Elit Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung memiliki kedudukan strategis di dalam masyarakat adat, sehingga setiap kandidat yang dekat dan melibatkan elit tradisional dapat meningkatkan reputasi mereka.

Dalam Pilkada Kerinci tahun 2018, elit tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung mempunyai peran penting dalam memenangkan pasangan calon. Mereka berperan dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih calon kepala daerah.

Keumudian peran elit agama dalam pilkada Kabupaten Kerinci juga menjadi salah satu faktor kemenangan pasangan Adirozal dan Ami Taher pada Pilkada 2018. Pilkada Bupati, sebagai sebuah perhelatan demokrasi di tingkat kabupaten, membuka ruang partisipasi bagi berbagai elemen masyarakat, termasuk elit agama, yang memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada secara langsung dapat mewujudkan kesetaraan politik antarkomponen masyarakat, sekaligus mengurangi potensi konsentrasi kekuasaan. Penyelenggaraan pilkada secara langsung memiliki potensi untuk mendistribusikan kekuasaan secara luas, memungkinkan kelompok miskin, kelompok terpinggirkan, serta perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Akuntabilitas publik diperkuat melalui pilkada langsung karena lebih mudah diakses oleh masyarakat lokal, sehingga kepala daerah terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan pemimpin politik nasional atau pejabat pemerintah.

Peran Elite Tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung dalam Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Kerinci

Tigo Luhah Tanah Sekudung dipimpin oleh tiga depati yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat adat. Mereka berperan sebagai elit tradisional dengan kedudukan sosial-budaya yang kuat, meski dalam teori elit (Mosca, Pareto, Keller) mereka termasuk elit yang tidak memerintah secara formal.

Dalam Pilkada Kerinci 2018, peran elit adat dapat dilihat melalui kerangka teori peran Soekanto: peran aktif, partisipatif, dan pasif.

1. Peran Aktif → Secara formal elit adat dihormati dan mampu memengaruhi arah pilihan masyarakat. Namun, karena dua kandidat berasal dari Tanah Sekudung, pengaruhnya tidak terlihat dominan. Sebagian masyarakat juga mulai lebih rasional dalam memilih, sehingga arahan tokoh adat hanya berpengaruh pada sebagian kecil warga.
2. Peran Partisipatif → Elit adat menggunakan hak pilihnya, ikut mensosialisasikan tahapan Pilkada, serta berperan sebagai penghubung antara kandidat dan masyarakat. KPU pun berharap tokoh adat dapat mengedukasi masyarakat agar memilih secara cerdas dan objektif.
3. Peran Pasif → Depati dan ninik mamak tetap menjaga marwah adat dengan tidak terlalu terlibat langsung, tetapi tetap memberi pengaruh secara halus terhadap anak kemenakan dalam menentukan pilihan.

Dengan kedudukan strategisnya, depati dan ninik mamak tetap menjadi rujukan politik masyarakat, baik sebagai penyejuk konflik maupun sebagai pengarah pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa elit tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung masih memiliki peran penting dalam Pilkada, meskipun pengaruhnya lebih terlihat dalam bentuk partisipatif dan pasif, bukan dominasi langsung.

Elit Tradisional tersebut juga dapat dikatakan elit politik lokal yang memiliki posisi, reputasi dan pengaruh. Menurut Abu Bakar

Menurut saya kalau dalam mengajak dan memilih sebenarnya sangat berpengaruh karena orang adat itu sangat dihormati di dalam desa maka dari itu anak kemenakan (masyarakat) selalu melihat kemana arah yang akan dibawa oleh orang adat tersebut. (*Abu Bakar Tokoh Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung*)

Akan tetapi elit tradisional tidak dapat menunjukkan eksistensinya yang secara jelas dan aktif karena ada dua kandidat yang berasal dari tanah sekudung dan selain dari pada itu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Dani yang mengatakan bahwasannya

Secara aktif menurut saya tidak ada yang begitu dapat mempengaruhi masyarakat dalam Pilkada karena masyarakat sekarang sudah pintar semua dia akan memilih tergantung kepentingan, sebagian kecil orang yang masih mengikuti arahan tokoh agama ataupun orang Adat jika dipersentasekan yang mau mendengarkan tokoh agama dan orang adat paling sekitar 10% itupun mungkin orang yang paling dekat dengannya. (*Tokoh Pemuda Tigo Luhah Tanah Sekudung*)

Sembari dari pada itu Bawaslu –meskipun dalam pantauannya pemangku adat dapat berpengaruh dalam membawa dan berharap orang tidak terlalu aktif dan dapat mendinginkan suasana.

Begitu pula pernyataan dari Elit Tradisional itu sendiri –selaku Depati tidak boleh terlalu aktif tetap ada marwah selaku orang adat dalam terlibat dengan politik dalam menjalankan politik dengan artian ia memberikan kebebasan yang terarah kepada anak buah anak kemenakan dalam menentukan pilihan.

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Pada Pilkada Kerinci 2018 apabila dilihat secara umum para elit tradisional telah menggunakan haknya dengan baik. Artinya secara mendasar ia telah menunjukkan peran partisipasinya.

Kemudian apabila merujuk dari apa yang diungkapkan Soekanto peran elit tradisional terbagi menjadi dua yakni peran pasif dan peran partisipatif. Elit tradisional dalam masyarakat tanah sekudung terbagi menjadi dua golongan yaitu Depati dan Ninik Mamak. Kedua tersebut memiliki dua peran kepemimpinan yang berbeda baik secara adat maupun perannya dalam kaitannya dengan pilkada. Terlebih dari itu ia juga dapat memberikan sumbangsih dalam mensosialisasikan pemilu.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ketua KPU Kabupaten Kerinci.

Bagi kami dalam proses sosialisasi memang ada orang adat, salah satunya komunitas adat dalam perannya KPU berharap orang adat itu bisa membantumensosialisasikan tahapan2 pilkada. -yang kedua kitajuga berharap orang-orang adat mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu bisa memilih secara cerdas artinya masyarakat lebih objektif dalam melihat program-program para calon. KPU berharap orang-orang adat ikut menjelaskan kepada masyarakat mengenai program-program para calon dan menjelaskan bahwa kita harus memilih berdasarkan kontestasi program, bukan kontestasi uang dll. Kpu berharap bahwa orang adat itu mengajak masyarakat berpolitik lebih baik. Dan KPU berharap orang adat itu menjadi penetralisir supaya masyarakat bisa memilih dengan objektif atas calon-calon yang ada jadi orang adat tidak terlibat dalam kepentingan untuk merebut kekuasaan oleh kandidat tertentu. (Kumaini Ketua KPU Kab. Kerinci.)

Partisipasi pasif elit tradisional dalam Pilkada Kerinci 2018 tampak melalui sikap menaati aturan serta memberi ruang bagi proses politik berjalan. Meski tidak terang-terangan, para Depati dan ninik mamak tetap memengaruhi arah pilihan anak kemenakan dalam mendukung kandidat tertentu. Hal ini mencerminkan keterkaitan sosial-budaya elit tradisional dengan masyarakat Tigo Luhah Tanah Sekudung secara menyeluruh. Kemudian daripada itu Depati dan Ninik Mamak dalam kepemimpinan Adat memiliki peran masing-masing. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Sebagai Depati merupakan pemimpin tertinggi didalam klebu –*dialah yang memenggal putus, membunuh mati.*” Wawancara Hasjinur pada tanggal 28 Juni 2024 mengutarakan bahwa Depati merupakan Cerhokum segala perkara.

Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Berdasarkan Hasil Wawancara kepada ketiga informandari kalangan Elit Tradisional semuanya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Selain itu depati dan ninik mamak juga yang melaksanakan perannya sebagai penghubung antara pasangan calon dengan anak kemenakan dari penghulu dan niniak mamak. Depati dan Niniak mamak mengungkapkan “*anak dipangku, punakan dibimbing, uhang kampung dipatenggang*” alllll (2 oktober2024) Kemudian begitu pula kata Hajinur *selaku tengganai memiliki wewenang dalam mengajukan dan mengarah anak buah anak punakan.* Yang mana memiliki peran untuk membawa ataupun memberi pencerahan untuk berpihak pada paslon yang memiliki kriteria yang tepat menurutnya.

Dengan demikian Elit tradisional mempunyai kedudukan strategis didalam masyarakat adat tigo luhah tanah sekudung, tidak dipungkiri bahwa setiap kandidat yang dekat dan melibatkan elit tradisional dapat meningkatkan reputasi mereka. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya Elit tradisional tigo luhah tanah sekudung memiliki peran penting dalam menentukan hasil Pilkada meskipun secara partisipatif dan pasif. Artinya bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya mengajukan mengerah menjelaskan bagaimana karakter dan visi misi pasangan calon yang di dukungnya melalui sosialisasi.

Sebagaimana pepatah adat kerinci menyatakan “*Ayam dilepeh, Tali Dipijak*” (ayam dilepas, talinya dipijak) maksudnya ia memiliki ikatan pasif tetap memiliki pengaruh selaku teganai dengan anak batino, anak buah dan anak kamanakan mereka. Jadi dari penjelasan diatas dapat diberi kesimpulan bahwasannya Pemilihan Kepala Daerah selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Memahami tentang

pengaruh elit lokal pada masyarakat dalam proses Pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat. Kaum elit merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Awal kemunculannya ialah karena kritik keras terhadap politik sosialisme (sosialisme marxis). Teori ini juga di arahkan untuk aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada apa yang disebut sebagai –elit penguasa yang dipertentangkan menentang gagasan demokratis dan sebagai bentuk sinisme terhadap aristokrat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran elit tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung (Depati dan Ninik Mamak) dalam Pilkada terbagi menjadi peran aktif, partisipatif, dan pasif. Mereka memiliki kedudukan strategis yang tidak hanya berpengaruh secara politik, tetapi juga sosial, budaya, dan psikologis melalui ikatan kekerabatan yang kuat. Kedekatan kandidat dengan elit tradisional terbukti mampu meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat, sehingga peran mereka tetap penting dalam menentukan hasil Pilkada. Maka dapat dikemukakan bahwasanya Elit tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung memiliki peranan penting dalam menentukan hasil pilkada meskipun secara aktif, partisipatif dan pasif

Saran

Bakal calon kepala daerah di Kerinci sebaiknya tidak mengabaikan peran elit tradisional, karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap arah pilihan masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dengan objek berbeda perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh elit tradisional terhadap kemenangan dalam Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nadir. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Jakarta: Averroes Press.
- Ali, yunasril. Dkk. 2005. *Adat Basendi Syara' : sebagai fondasi membangun masyarakat madani di Kerinci*. Kerinci: GP Press.
- Badjodah, H., & Ahmad, M. 2021. *Eksistensi elit lokal dalam politik lokal di Indonesia* . Jakarta: Penerbit Demokrasi.
- Bottomore, T. B. 1964. *Elites and society*. London: Routledge.
- Destrinal Lumendek. 2017. —*Peran Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Politico, Vol 7, No 3, hlm. 2.
- Dwipayana, Ari. 2012. *Demokrasi dan Akuntabilitas Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Eka. Suhartono, Nasruddin Nur, Peran Elite Adat Pada Pilkada Kabupaten Pinrang 2018, Jurnal Phinisi Integration Review, Vol 4, No 1
- Febri Rahmat, "Dukungan Politik Elit Adat Kecamatan Kuranji Kepada Irwan Prayitno- Nasrul Abit pada Pilkada Sumbar tahun 2015.
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Isan Bastiang, *Peran Tokoh Adat di Kota Ternate Dlam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur Maluku Utara Tahun 2018*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. 2019. *Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kerinci 2018* Kerinci: KPU Kerinci.
- Miles, Matthew B. dan Hubbermas, A. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mosca, G. 1939. *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- Nahrudin dkk, *Analisisrelasi Kekuasaan Elit Dalam Konteks Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Cahaya MANDALIKA.
- Pareto, Vilfredo. 1901. *The Mind and Society* (Trattato di Sociologia Generale). Harcourt, Brace & World.
- Syamsuddin Haris. 2014. *Pemilu Langsung di Indonesia: Konsep, Pelaksanaan, dan Problematikanya* Jakarta: Pustaka Obor.
- Wawancara Dengan Abu bakar, Tokoh Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung.
- Wawancara Dengan Ketua KPU Kab. Kerinci Tahun 2019-2024.